



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1171-1183

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak

Dinda Rachma Aditya^{1✉}, Devi Lusiany², Muhammad Yusuf Rangkuti³

Universitas Tidar

Email: dindarachma128@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Desa Ngemplak, tetap menjadi isu kompleks meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan metode kualitatif untuk mengkaji penyebab, proses dispensasi nikah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, norma sosial budaya, dan rendahnya pendidikan memicu pernikahan dini, yang berdampak pada perceraian, ketidakstabilan ekonomi, masalah kesehatan reproduksi dan terhambatnya pendidikan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan program kebijakan yang mendukung penundaan usia pernikahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Dispensasi Nikah, Desa Ngemplak.*

Abstract

Family support refers to various forms of physical, social, and emotional assistance that can create a sense of comfort for individuals. Anxiety is a person's psychological response to stress. This study aims to explore the relationship between family support and anxiety levels in pre-operative patients in the operating room preparation room of Harapan Pematang Siantar Hospital in 2023. The research method used was a correlational design with a cross-sectional and observational approach. The results showed that 25 respondents (78.1%) received family support in the good category, 6 respondents (18.8%) in the sufficient category, and 1 respondent (3.1%) in the less category. For the level of anxiety, 15 respondents (46.9%) experienced mild anxiety, 14 respondents (43.8%) experienced moderate anxiety, and 3 respondents (9.4%) experienced severe anxiety. The Spearman Rank correlation test showed a p value = 0.054 ($p < 0.05$) and a correlation coefficient of -0.344. Based on these results, it can be concluded that there is no significant relationship between family support and anxiety levels in the surgical room preparation room of Harapan Pematang Siantar Hospital in 2023. In the future, it is hoped that families can be more active in providing support to help reduce patient anxiety before undergoing surgery, so that patients can feel calmer and support their healing process

Keywords: *Family, Hospital, Patient*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang umum terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Ngemplak. Secara geografis dan demografis, Desa Ngemplak merupakan wilayah yang terpinggirkan dengan akses terbatas, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya. Kondisi ini menciptakan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan dini. Praktik pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi, tekanan sosial, serta norma budaya yang ada di masyarakat. Namun, pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hal kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan fisik dan mental. (Nasution, 2015)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun memiliki dampak negatif yang besar terhadap kesejahteraan sosial keluarga. Dampak ini meliputi kesulitan finansial karena pasangan muda yang belum siap secara ekonomi, keterbatasan dalam pendidikan, serta masalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Hal ini juga tercermin di Desa Ngemplak, yang masih menjadi tempat terjadinya praktik pernikahan dini, mengakibatkan kesulitan dalam mencapainya tujuan sosial yang lebih baik, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan muda itu sendiri, tetapi juga memengaruhi status sosial dan

kondisi ekonomi keluarga mereka. Banyak pasangan muda yang menikah pada usia dini sering kali tidak siap secara finansial untuk membesarkan anak-anak mereka, mengingat sebagian besar dari mereka mengandalkan pekerjaan bertani yang hasilnya terbatas. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, baik yang menikah maupun keturunannya, sering kali terputus dari pendidikan mereka karena orang tua mereka tidak mampu membiayainya.(Agus, 2023)

Kesejahteraan sosial, yang tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, dan kondisi psikologis pasangan muda, menjadi penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan sosial di Desa Ngemplak, serta peran perangkat desa dalam membantu masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Pemberdayaan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa), juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan dini. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pernikahan dini adalah melalui program "Desa Cerdas" yang diselenggarakan oleh PPK Ormawa. Program ini bertujuan untuk merubah pola pikir anak-anak di desa agar lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Dengan memberikan akses pendidikan dan literasi yang lebih baik kepada anak-anak di Desa Ngemplak, diharapkan dapat mencegah pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda di masa depan.(Rasyid *et al.*, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, serta prosedur pengajuan dispensasi nikah yang ada di Desa Ngemplak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang dilakukan melalui pengamatan langsung selama pelaksanaan program PPK Ormawa dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Ngemplak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai isu pernikahan dini, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat inisiatif pendidikan di masyarakat. Pernikahan dini di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun, tetap berlangsung di berbagai wilayah, terutama di pedesaan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Jannah, Palutturi, dan Syafar (2020), menunjukkan bahwa pernikahan dini sering terjadi pada remaja yang masih dalam fase transisi perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Akibatnya, mereka seringkali belum siap

menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu, beberapa faktor seperti ekonomi, norma budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini. (Utama *et al.*, 2020)

Praktik dispensasi nikah sering menjadi indikator tingginya angka pernikahan dini, meskipun telah ada peraturan yang memperketat persyaratannya. Penelitian oleh Ningrum dan Retnowulandari (2023) menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah sering didorong oleh faktor ekonomi, tekanan sosial, dan norma budaya. Di sisi lain, pernikahan dini membawa dampak yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung kehilangan akses pendidikan, yang membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Secara biologis, mereka menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi karena tubuh mereka yang belum siap untuk menjalani kehamilan. Secara psikologis, pernikahan dini dapat memicu stres dan gangguan mental akibat tanggung jawab rumah tangga yang harus dijalani pada usia muda. Dampak negatif pernikahan dini ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga berimbas pada dinamika sosial masyarakat secara luas, meningkatkan angka kemiskinan dan ketidakstabilan keluarga. Fenomena ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan dan membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menanggulangi pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara dispensasi nikah dan kesejahteraan sosial, serta dampak pernikahan dini terhadap kualitas pendidikan di Desa Ngemplak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. (Hidayat dan Lathifah, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi empiris dengan metode kualitatif untuk memahami fenomena pernikahan dini di Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Tujuan utama penelitian adalah menggali pandangan masyarakat tentang pendidikan dan pernikahan dini, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhinya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, seperti Kepala Desa, perangkat desa, ketua PKK, anggota PKK, dan Kepala KUA Kecamatan Windusari. Hasil

wawancara memberikan wawasan tentang alasan masyarakat memilih pernikahan dini, peran perangkat desa dalam pengajuan dispensasi nikah, serta kendala yang dihadapi dalam menekan angka pernikahan dini. Observasi partisipatif dilakukan selama pelaksanaan program "Desa Cerdas" dalam kegiatan PPK Ormawa, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Ngemplak lebih dari empat bulan. Observasi ini mencakup pelaksanaan Pojok Literasi yang bertujuan meningkatkan literasi anak-anak dan mengubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya pendidikan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan statistik lokal, publikasi akademik, serta regulasi pemerintah mengenai pernikahan dini dan dispensasi nikah. Data ini memberikan konteks lebih luas mengenai dampak sosial dan ekonomi pernikahan dini di desa tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama, seperti faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, serta peran program intervensi dalam menanggulangi fenomena tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, akses pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam mencegah pernikahan dini. (Wulandari, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ngemplak terletak di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki populasi sekitar 6.484 jiwa dan terdiri dari empat dusun. Meskipun desa ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi desa cerdas, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Salah satu isu terbesar di Desa Ngemplak adalah tingginya angka pernikahan usia dini, serta rendahnya angka kelulusan dan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan setelah jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, angka putus sekolah di Desa Ngemplak cukup signifikan, dengan 17,68% atau sekitar 424 orang yang tidak melanjutkan pendidikan setelah SD, dan sekitar 15,93% atau 382 orang belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Sebagian besar penduduk desa ini hanya memiliki pendidikan dasar, dengan lebih dari setengahnya, yakni 51,92% atau 1.245 orang, lulus dari SD. Sementara itu, hanya 14,47% atau sekitar 347 orang yang melanjutkan pendidikan hingga SMP. Hal ini menunjukkan rendahnya minat terhadap pendidikan di kalangan masyarakat desa, yang turut berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan kualitas pendidikan di desa tersebut, terutama di kalangan anak-anak yang tidak

melanjutkan pendidikan setelah tingkat pertama.

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Desa Ngemplak adalah pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan formal tidak relevan, karena mereka lebih fokus pada pekerjaan sebagai petani yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Masyarakat lebih memilih anak-anak mereka untuk segera bekerja dan membantu keluarga, sehingga pendidikan formal dianggap kurang penting. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka pernikahan usia dini, di mana anak-anak muda merasa bahwa menikah adalah jalan keluar dari keterbatasan ekonomi dan peluang pendidikan yang terbatas.

Pernikahan Dini di Indonesia

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu serius yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berimplikasi pada masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang No. 16/2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, namun pernikahan yang terjadi sebelum usia ini dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini umumnya terjadi pada remaja yang masih berada dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat kedelapan di dunia untuk kasus pernikahan dini. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama di daerah pedesaan, di mana anak perempuan dua kali lebih rentan untuk menikah dini dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini ini, termasuk faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. (Hastuti dan Soehartono, 2018)

Fenomena Pernikahan Dini di Desa Ngemplak

Fenomena pernikahan dini di Desa Ngemplak sangat memprihatinkan, terutama di Dusun Ngemplak, di mana banyak remaja yang menikah pada usia 15-17 tahun. Fenomena ini meningkat pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah besar yang perlu segera diatasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuning, Ketua PKK Desa Ngemplak, fenomena pernikahan dini ini terjadi terutama karena norma sosial yang sangat kuat di desa tersebut. Stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, seperti "perawan tua," menyebabkan orang tua merasa cemas dan segera mencari pasangan untuk anak perempuan mereka. Selain itu, di Desa Ngemplak, masyarakat masih sangat mempercayai tradisi dan norma yang menganggap bahwa menikah pada usia muda adalah jalan yang sah untuk menghindari perbuatan zina. Hal ini menambah kompleksitas masalah pernikahan dini di desa ini. Sebagian besar orang tua merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka lebih baik daripada membiarkan

mereka terus berhubungan dengan pasangan tanpa ikatan pernikahan, meskipun usia mereka belum mencukupi.(Wajdi, 2022)

Dispensasi Nikah dan Prosesnya di Desa Ngemplak

Di Indonesia, undang-undang memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin menikah meskipun usia mereka belum memenuhi batas minimal yang ditentukan, yaitu 19 tahun. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua ke pengadilan agama dengan alasan yang sah, seperti kebutuhan yang mendesak atau situasi tertentu yang mengharuskan pasangan tersebut menikah meskipun usianya belum mencukupi. Dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah risiko yang lebih buruk, seperti perceraian dini, masalah kesehatan reproduksi, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Desa Ngemplak dimulai dengan orang tua yang mengajukan permohonan ke pengadilan agama setelah ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) karena calon mempelai belum memenuhi usia pernikahan yang sah. Proses ini melibatkan evaluasi psikologis terhadap calon pengantin, serta verifikasi administratif yang cukup ketat. Namun, meskipun pengadilan menolak permohonan dispensasi, beberapa pasangan tetap memilih untuk menikah secara siri karena tekanan sosial dan budaya yang sangat kuat.(Nuvitalia *et al.*, 2022)



Gambar 1. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi dan Pembukaan Program Desa Cerdas PPK Ormawa

Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Ngemplak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Ngemplak, di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan. Faktor Ekonomi: Sebagian besar penduduk Desa Ngemplak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan yang memiliki pendapatan terbatas. Hal ini menyebabkan banyak orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka adalah cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Mereka percaya bahwa pernikahan dini akan mengurangi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, pandangan ini

bertentangan dengan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Faktor Sosial dan Budaya: Norma sosial di Desa Ngemplak yang menganggap bahwa perempuan yang belum menikah pada usia tertentu adalah "perawan tua" sangat berpengaruh terhadap keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka. Tekanan sosial ini menyebabkan banyak keluarga merasa terpaksa untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun usia mereka belum mencukupi. Hal ini juga terkait dengan tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk mempererat hubungan antar keluarga besar dan menghindari stigma sosial.(Nugroho, 2023)



Gambar 2 .Wawancara dengan Perangkat Desa terkait Kondisi dan Permasalahan di Desa Ngemplak guna Keberlanjutan Pelaksanaan Program Desa Cerdas PPK Ormawa

Faktor Pendidikan: Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan di Desa Ngemplak. Mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga SD atau SMP, dan banyak yang putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan, baik dari segi jarak maupun biaya. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka semakin memperburuk masalah ini. Dengan kondisi ini, banyak anak-anak yang berhenti sekolah dan memilih bekerja membantu orang tua mereka di ladang atau kebun. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, dan pernikahan dini menjadi solusi yang lebih cepat untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga.

Upaya Mengatasi Pernikahan Dini

Untuk mengurangi fenomena pernikahan dini di Desa Ngemplak, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan, perubahan norma sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Pendidikan yang lebih baik harus menjadi prioritas, dan orang tua serta masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan dukungan kepada

keluarga melalui program-program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Hal ini penting untuk menciptakan generasi muda yang lebih terdidik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. (Putri *et al.*, 2021)

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Desa Ngemplak

Pernikahan dini di Desa Ngemplak menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan sosial dan kualitas pendidikan masyarakat. Beberapa dampak utama yang muncul di antaranya adalah:

Ketidakstabilan Ekonomi Rumah Tangga

Pernikahan dini sering kali mengarah pada ketidakmampuan pasangan muda untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum matang baik secara mental maupun finansial. Mereka sering kali tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil dan masih bergantung pada keluarga besar. Hal ini menyebabkan pasangan muda kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Banyak yang akhirnya kembali ke pekerjaan tradisional seperti buruh tani atau pekerjaan dengan penghasilan terbatas. Menurut Bapak Makful, meskipun pernikahan muda terjadi karena kondisi tertentu, ketergantungan finansial terhadap orang tua tetap menjadi masalah utama. Beliau juga menyampaikan bahwa permasalahan rumah tangga sering muncul di kalangan pasangan pernikahan dini. Ketidakstabilan mental dan ketidaksiapan mengemban tanggung jawab berumah tangga sering memicu konflik yang berujung pada perceraian. Sebagai contoh, dalam satu kasus, suami tidak bertanggung jawab sebagai pencari nafkah dan meninggalkan istrinya. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya pendampingan bagi pasangan muda agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam berumah tangga.

Dampak Terhadap Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasangan muda yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sering kali mengakibatkan pola asuh yang tidak optimal, yang berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Ibu Kozimah, salah seorang anggota PKK, mengungkapkan bahwa angka stunting di Desa Ngemplak masih tergolong tinggi, terutama di kalangan anak-anak yang lahir dari pasangan muda. Stunting atau kegagalan pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh, dan keterlambatan kemampuan belajar. Untuk mengatasi hal

ini, edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi sangat penting untuk mempersiapkan pasangan muda agar mampu merawat kehamilan dan memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak mereka.

Putus Sekolah dan Rendahnya Akses Pendidikan

Pendidikan adalah elemen kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh pekerjaan yang layak. Sayangnya, banyak remaja di Desa Ngemplak yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka setelah menikah. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga, yang kemudian menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di masa depan. Fenomena putus sekolah yang terkait dengan pernikahan dini memperburuk masalah ini. Generasi muda yang kurang terdidik sering kali memiliki keterbatasan dalam berkontribusi pada pembangunan sosial, yang pada akhirnya melanggengkan siklus kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan di desa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan mencegah pernikahan dini agar masa depan generasi muda dapat lebih terjamin. (Guo *et al.*, 2021)

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Dusun Petung

Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, serta mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan keluarga. Di Desa Ngemplak, Dusun Petung dipilih untuk dicanangkan sebagai Kampung KB karena memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung keberhasilan program ini, seperti tingginya angka pernikahan dini dan rendahnya tingkat pendidikan. Kampung KB berfokus pada pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Program ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Windusari menjalankan berbagai program untuk mengawasi dan mencegah pernikahan dini. Salah satu program yang dijalankan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang

sah berdasarkan undang-undang. KUA juga menekankan dampak negatif dari pernikahan dini, termasuk risiko kesehatan, stunting, dan rendahnya tingkat pendidikan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum, seperti majelis ta'lim, yasinan, dan pertemuan komunitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga calon pengantin benar-benar siap secara fisik, mental, dan finansial.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ibu-ibu PKK di Desa Ngemplak aktif mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Melalui program ini, ibu-ibu rumah tangga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak mereka tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini. Program ini juga berfokus pada memberikan informasi mengenai kesiapan mental, fisik, dan finansial dalam membangun rumah tangga. Salah satu program yang dilakukan adalah Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Windusari untuk menyampaikan materi terkait pernikahan yang sehat dan terencana.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Program Desa Cerdas Berbasis Pada Penguatan Literasi dan Pendidikan di Desa Ngemplak oleh Tim PPK Ormawa UBC Radio

Program Desa Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di Desa Ngemplak, sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dini. Melalui kerja sama dengan beberapa sekolah di desa ini, program ini mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dan menanggukkan pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik. Program ini juga mendirikan tujuh Pojok Literasi di berbagai dusun untuk meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah. Pojok Literasi ini menyediakan pelajaran nonformal yang menyenangkan, seperti membaca, berhitung, public speaking, penguasaan bahasa Inggris, dan keterampilan ecoprint. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan perubahan pola pikir masyarakat dan mengurangi fenomena pernikahan dini, sehingga generasi muda di Desa Ngemplak dapat meraih masa depan yang lebih baik, dengan pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih sejahtera. (Xie *et al.*, 2020)

SIMPULAN

Pernikahan dini di Desa Ngemplak menjadi masalah serius yang memengaruhi kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat. Meskipun ada regulasi yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, faktor ekonomi, tradisi, dan tekanan sosial masih mendorong banyak remaja untuk menikah muda. Hal ini menyebabkan dampak negatif seperti putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk menanggulangi pernikahan dini ini. Untuk mengurangi angka pernikahan dini, pembangunan fasilitas pendidikan menengah di Desa Ngemplak sangat penting untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Program literasi seperti Desa Cerdas perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak buruk pernikahan dini. Penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan juga sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya pernikahan dini. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang sering menjadi pemicu pernikahan dini. Semua upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngemplak.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agus, D. (2023), "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja berbeda jauh dengan substansi dalam UU Cipta Kerja . Dalam hal ini , substansi sebagaimana substansi UU Cipta Kerja . Kerja maupun Perppu C", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, hal. 87–100.
- Guo, Y., Zhao, H., Zhang, S., Wang, Y. dan Chow, D. (2021), "Modeling and optimization of environment in agricultural greenhouses for improving cleaner and sustainable crop production", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 285, hal. 124843, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124843>.
- Hastuti, T.P. dan Soehartono, S. (2018), "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1, hal. 34–41.
- Hidayat, R.F. dan Lathifah, E. (2022), "Cases of Rohingya Refugees in the Perception of International Law Article Information", *Journal ASEAN Dynamics and Beyond*, Vol. 3 No. 2, hal. 79–88.

- Nasution, B.J. (2015), "Fungsi kebebasan berserikat bagi pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila", *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Nugroho, R. (2023), "Pengaruh Faktor Motivasi terhadap Prestasi Belajar Matematika dalam Pengajaran Online", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 4, hal. 1–12.
- Nuvitalia, D., Saptaningrum, E., Ristanto, S. dan Putri, M.R. (2022), "Profil Kemampuan Berpikir Komputasional (Computational Thinking) Siswa SMP Negeri Se-Kota Semarang Tahun 2022", *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, Vol. 13 No. 2, hal. 211–218, doi: 10.26877/jp2f.v13i2.12794.
- Putri, N.I., Herdiana, Y., Munawar, Z. dan Musadad, D.Z. (2021), "Keamanan basis data berdasarkan teori himpunan", *Jurnal Infotronik*, Vol. 6 No. 2, hal. 56–60, doi: 10.32897/infotronik.2021.6.2.695.
- Rasyid, S., Prabandari, A.P., Chris, B. dan Simanjuntak, C. (2022), "The Role of Indonesian Diplomacy in Government and the Rohingya Muslim The Role of Indonesian Diplomacy in Managing the Conflict between The Myanmar Government and The Rohingya Muslim Ethnic", *Unnes Law Journal*, Vol. 8 No. 1, hal. 159–178.
- Utama, I.G.A.A., Mangku, D.G.S. dan Yuliantini, N.P.R. (2020), "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 3, hal. 208–219.
- Wajdi, F. (2022), *Hukum dan Kebijakan publik*, Sinar Grafika.
- Wulandari, V. (2022), "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Persepektif Sejarah Dan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2 No. 3, hal. 31–58.
- Xie, Y., Li, J., Guo, X., Zhao, J., Yang, B., Xiao, W. dan Yang, H. (2020), "Health status among greenhouse workers exposed to different levels of pesticides: A genetic matching analysis", *Scientific Reports*, Springer US, Vol. 10 No. 1, hal. 1–13, doi: 10.1038/s41598-020-65662-1.